



ANALISIS PERTUMBUHAN ARUS KAS SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA KEUANGAN PADA LAPORAN ARUS KAS UPTD PUSKESMAS SEROJA

Waluyo¹, Safira Balqis Sulaeman²

waluyo@ibm.ac.id¹, sbalqis89@gmail.com²

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah dalam praktiknya masih belum mencapai tingkat kesempurnaan, dengan masih ada kendala yang perlu diperbaiki, terutama terkait masalah akuntansi dalam situasi-situasi tertentu yang dapat menjadi hambatan teknis bagi eksekutif dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu contohnya adalah implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, yang merupakan kebijakan akuntansi yang diwajibkan dalam pengelolaan keuangan negara saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Kinerja Keuangan UPTD Puskesmas Seroja dengan menggunakan data dari Laporan Arus Kas. Metode yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Seroja. Hasil analisis dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Arus Kas UPTD Puskesmas Seroja selama tahun anggaran 2020-2022, mengindikasikan bahwa kinerja keuangan UPTD Puskesmas Seroja di tahun tersebut dalam kondisi baik namun mengalami pertumbuhan yang tidak stabil.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Arus Kas

ABSTRACT

Regional financial management in practice still has not reached the level of perfection, with there are still obstacles that need to be improved, especially related to accounting issues in certain situations that can become technical obstacles for executives in managing regional finances. One example is the implementation of the accrual-based Government Accounting System (SAP), which is an accounting policy required in current state financial management. This study aims to measure the Financial Performance of UPTD Puskesmas Seroja by using data from the Cash Flow Statement. The method applied is quantitative descriptive research using secondary data obtained from the Treasurer of the Regional Public Service Agency (BLUD) UPTD Puskesmas Seroja. The results of the analysis of this study based on the results of the analysis of the UPTD Puskesmas Seroja Cash Flow Statement during the 2020-2022 fiscal year, indicate that the financial performance of the UPTD Puskesmas Seroja in that year was in good condition but experienced unstable growth.

Keywords: Financial Performance, Cash Flow Growth

PENDAHULUAN

Untuk mencapai kesetaraan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia, Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola Pemerintah Independen dalam tata pemerintahan, keuangan, dan pembangunan. Dalam aspek pengelolaan keuangan, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan melaksanakannya dengan tepat, penuh tanggung jawab serta keterbukaan yang optimal.

Seiring perkembangan dalam mengelola keuangan pemerintah daerah, baik secara internal dengan meningkatkan pencapaian kinerja yang optimal, maupun dari perspektif eksternal dengan adanya tuntutan masyarakat untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi otonomi daerah yang mengutamakan pelayanan publik.

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan daerah masih mencapai tingkat kesempurnaan, dan masih terdapat kendala yang perlu diatasi, terutama dalam hal akuntansi yang berlaku dalam situasi tertentu. Kendala ini akan menjadi tantangan bagi pihak eksekutif dalam mengelola keuangan daerah, khususnya terkait penerapan kebijakan akuntansi wajib berupa SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan Negara saat ini. Penelitian yang telah dilakukan mengenai factor-faktor seperti sumber daya manusia, insentif, dan fasilitas pendukung juga memiliki pengaruh terhadap implementasi siste SAP berbasis akrual tersebut (Nasution, 2019).

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan pemerintah dalam jangka waktu satu periode pelaporan. Informasi ini memiliki nilai yang signifikan bagi berbagai pihak, baik yang berada diinternal maupun eksternal. Bagian internal yang membutuhkan informasi termasuk pemerintah itu sendiri, yang menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi operasi selama periode tertentu dan sebagai alat analisis untuk dalam pengambilan keputusan dimasa depan. Di sisi lain, pihak eksternal yang membutuhkan informasi ini termasuk kreditor, investor, serta pemerintah daerah atau entitas luar negeri dalam konteks pinjaman baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu komponen penting dalam rangka penyusunan laporan keuangan adalah laporan arus kas. Laporan arus kas mencakup seluruh informasi mengenai aliran masuk dan keluar dana tunai baik dari aktivitas operasi, pendanaan maupun investasi. Keberadaan arus kas memiliki peranan yang sangat penting bagi entitas yang terus menjalankan operasional juga turut dipengaruhi oleh aliran kas yang ada. Oleh karena itu, Informasi yang diungkapkan dalam laporan arus kas memiliki nilai yang signifikan bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Meski penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah, termasuk di dalamnya laporan arus kas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi dengan efisiensi dan efektivitas juga diperkuat oleh petunjuk yang dihasilkan dari laporan arus kas ini.

Laporan Arus Kas merupakan sebuah komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki tujuan memberikan gambaran mengenai perubahan kas yang terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka memahami pergerakan dana tunai yang berasal dari berbagai aktivitas yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Aktivitas yang dimaksud dalam konteks ini meliputi investasi dalam aset non-keuangan, operasional, pembiayaan anggaran, serta aktivitas di luar anggaran yang turut berdampak pada situasi keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan arus kas menjadi suatu kegiatan yang esensial bagi pemerintah daerah, dimana hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang aliran dana masuk dan keluar, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aspek keuangan daerah. Di samping itu, masyarakat juga mendapatkan manfaat dalam bentuk pemahaman dan penilaian mengenai penggunaan dana yang jelas dan transparan, yang mampu memberikan gambaran konkret mengenai alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam sektor kesehatan. Dalam menjalankan fungsinya, keberadaan dana tunai memiliki peran yang sangat vital dalam

mendukung segala operasional yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas. Oleh karena itu, dengan menganalisis berbagai komponen yang terdapat dalam laporan arus kas, dapat diungkapkan bagaimana UPTD Puskesmas mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya serta sejauh mana kemampuan UPTD Puskesmas dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti melihat bahwa pentingnya laporan arus kas sebagai alat yang sangat berperan dalam menilai kinerja keuangan suatu UPTD Puskesmas.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Ini melibatkan berbagai jenis aset yang terkait dengan hak dan kewajiban pemerintah daerah, yang semuanya dijelaskan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pedoman pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dalam konteks keuangan daerah harus dicatat dan diatur dalam APBD. Tujuan dari penerimaan dan pengeluaran ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan desentralisasi pemerintahan. Namun, perlu dicatat bahwa penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau bantuan pemerintah pusat kepada daerah tidak dicatat dalam APBD (Nasution, 2019).

Dalam administrasi daerah, tanggung jawab diemban oleh Pejabat Keuangan Daerah (PPKD), yang bertindak sebagai kepala Satuan Kerja Pengelola Daerah (SKPKD) yang bertugas mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memegang peran sebagai Bendahara Umum Daerah. Sebaliknya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah entitas pemerintahan yang memanfaatkan dana dan barang untuk kegiatan operasionalnya. Pejabat

Tanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), meliputi :

1. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan keuangan daerah.
2. Menyusun rencana dan melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Melaksanakan pengumpulan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
4. Berperan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan perannya yang ditetapkan.
5. Menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menunjukkan bahwa SAP merujuk pada prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pemerintah. Grup Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengembangkan SAP dengan dasar konsep akuntansi pemerintahan. Konsep ini digunakan sebagai panduan bagi KSAP, auditor, dan penerima laporan keuangan untuk mengatasi isu yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi. (Peraturan Presiden Republik Indonesia NOMOR 71 TAHUN 2010, 2020)

Peraturan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/Tahun 2011 tentang Panduan Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP). Panduan ini memberikan arahan kepada instansi pemerintah dalam merancang Sistem Akuntansi Pemerintahan yang didasarkan pada prinsip akuntansi berbasis Akrual, yang sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sistem Akuntansi Pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah juga disusun berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan Pedoman Umum

Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sebagai panduan teknis, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Daerah Nomor 64 tahun 2013 yang memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada prestasi dalam aspek keuangan daerah, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah, yang dilakukan dengan mematuhi sistem keuangan yang diatur sesuai kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku selama satu periode anggaran (Anshori, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dikenal sebagai hasil dari pengelolaan finansial daerah yang mencerminkan tingkat pencapaian target instansi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah diamanatkan.

Tujuan kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain adalah :

1. Mengukur tingkat pencapaian tujuan organisasi.
2. Meningkatkan kinerja pada periode berikutnya dan memberikan pengalaman belajar kepada pegawai.
3. Menyusun pertimbangan yang terstruktur saat membuat keputusan tentang memberikan penghargaan atau sanksi.
4. Membangun transparansi publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pengelolaan Keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas

Dalam instansi pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat didirikan untuk melaksanakan tugas operasional dan dukungan teknis di suatu wilayah kerja atau beberapa kecamatan. UPTD juga dapat menjadi bagian dari badan-badan pemerintahan. Ketetapan dari kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menjelaskan peraturan pembentukan UPTD dalam dinas dan badan. Jenis-jenis UPTD dan struktur organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sebagai contoh, Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan adalah salah satu model UPTD yang juga berfungsi sebagai layanan primer kepada masyarakat, membuatnya menjadi contoh layanan publik terdepan karena perannya dalam melayani publik. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Sumber dana penggunaan dana UPTD Puskesmas :

APBD Kabupaten/Kota

Sumber dana UPTD Puskesmas yang diperoleh dari APBD/Kota meliputi :

- a) Dana dari APBD diserahkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Belanja langsung dan Tidak Langsung.
- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Bidang Kesehatan merupakan sumber pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat dan dialokasikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota. DAK ini berupa alokasi non-fisik yang umumnya dikenal sebagai Biaya Operasional Kesehatan (BOK), yang diberikan kepada Puskesmas untuk mendukung pencapaian program-program kesehatan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini digunakan untuk menyediakan layanan dasar kesehatan serta pelayanan rujukan kesehatan.

Pihak ketiga

Dana untuk Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diperoleh dari dua sumber dana, yaitu dana kapitasi dan dana non-kapitasi. Dana ini merupakan alokasi keuangan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bagian dari program jaminan kesehatan nasional. Sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Puskesmas bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan umum

termasuk observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan layanan kesehatan lainnya yang tidak bersifat spesialis.

Sistem pendanaan ini mengadopsi dua pendekatan, yakni dana kapitasi dan dana non-kapitasi. Dana kapitasi merupakan pembayaran bulanan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, tanpa memperhatikan jenis atau jumlah layanan kesehatan yang diberikan. Di sisi lain, dana non-kapitasi dihitung berdasarkan klaim yang diajukan oleh Puskesmas.

Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS dimanfaatkan untuk dua keperluan utama:

- a) Pembayaran layanan kesehatan yang diberikan.
- b) Pendanaan operasional untuk pelayanan kesehatan.

Alokasi dana untuk pembayaran layanan pelayanan kesehatan minimal harus mencapai 60% dari total penerimaan dana kapitasi. Sementara itu, alokasi untuk mendukung pengeluaran biaya operasional layanan kesehatan dihitung sebagai selisih antara total dana kapitasi dan alokasi untuk layanan kesehatan, yaitu sebesar 40%. Penggunaan dana ini biasanya mengikuti pedoman teknis yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dalam konteks pelayanan kesehatan.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang merinci dan menggambarkan perubahan kas serta perubahan bersih dalam kas yang dihasilkan oleh operasional perusahaan, aktivitas investasi, dan pendanaan selama suatu periode keuangan tertentu. Lebih lanjut, laporan ini berfungsi sebagai alat yang memungkinkan menelusuri dan mencocokkan saldo kas pada awal dan akhir tahun anggaran. (Santoso et al., 2021).

Laporan arus kas menggambarkan perubahan dalam nilai kas yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan sebagai hasil dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar dari perusahaan.

Laporan arus kas harus disiapkan dan disajikan oleh unit organisasi yang bertanggung jawab atas fungsi perbendaharaan umum. Biasanya, unit organisasi tersebut ditunjuk sebagai bendaharawan umum negara atau daerah, atau memiliki wewenang serupa dengan bendaharawan umum negara atau daerah.

Adapun pengelompokan dari laporan arus kas meliputi klasifikasi sebagai berikut:

Aktivitas Operasi (*Operating Activities*)

Aktivitas operasional mengacu pada aliran kas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran kas yang timbul dari kegiatan operasional pemerintah selama suatu periode akuntansi tertentu. Arus kas bersih dari aktivitas operasional mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menghasilkan kas dari operasinya sendiri, yang akan mendukung pembiayaan kegiatan di masa depan tanpa harus bergantung pada sumber dana eksternal.

Aktivitas Investasi (*Investing Activities*)

Arus kas dari aktivitas investasi mencakup transaksi yang terkait dengan akuisisi dan disposisi aset jangka panjang dan investasi lainnya yang tidak berupa uang tunai. Pengungkapan terpisah diperlukan untuk arus kas dari aktivitas investasi karena ini mencerminkan aliran masuk dan keluar kas yang terkait dengan penguatan dan dukungan terhadap layanan pemerintah kepada masyarakat di masa depan.

Aktivitas Pendanaan (*Financing Activities*)

Aktivitas pendanaan melibatkan arus kas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam konteks pemberian dan pelunasan utang jangka panjang serta transaksi lain yang berdampak pada perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Aktivitas Transitoris (*Transitory Activities*)

Aktivitas transitoris melibatkan arus kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencakup penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan yang tidak berdampak pada penerimaan, pengeluaran, atau pendanaan pemerintah. Contoh dari aktivitas ini termasuk transaksi dengan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pengembalian atau pemberian dana persediaan kepada bendahara pengeluaran, juga perpindahan dana. PFK mengacu pada dana yang ditarik atau diberikan secara tunai kepada pihak ketiga berdasarkan Surat Perintah Membayar.

METODELOGI PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan di UPTD Puskesmas Seroja, yang berlokasi di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif, yang mencakup evaluasi pertumbuhan arus kas. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta analisis laporan arus kas dari tahun 2020 hingga 2022, serta referensi literatur. Dalam analisis data, langkah-langkah yang dilakukan mencakup perhitungan pertumbuhan arus kas pada aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris dari laporan arus kas. Langkah ini diikuti oleh penyajian hasil perhitungan tersebut dalam bentuk tabel dan grafik. Data kemudian dijelaskan secara rinci dengan berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan arus kas untuk tiap aktivitas dari laporan arus kas. Penelitian ini menggunakan metode analisis arus kas untuk aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Metode Analisis Data

1. Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Operasi

$$\text{Tahun } n = \frac{\text{AKO}_n - \text{AKO}_{n-1}}{\text{AKO}_{n-1}} \times 100 \%$$

- a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan saldo positif, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kemampuan mandiri dalam pembiayaan kegiatan operasional rutin secara internal. Mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan atau efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional instansi pemerintah daerah.
- b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan saldo negatif, menggambarkan kinerja keuangan pemerintah yang kurang baik, penurunan pendapatan atau peningkatan biaya operasional yang melebihi pendapatan yang dihasilkan. Pemerintah daerah atau pusat memerlukan tambahan dana luar untuk tetap melanjutkan kegiatan operasional rutinnnya.

2. Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Investasi

$$\text{Tahun } n = \frac{\text{AKI}_n - \text{AKI}_{n-1}}{\text{AKI}_{n-1}} \times 100 \%$$

- a. Arus kas bersih dari aktivitas investasi menunjukkan saldo positif, mengindikasikan kinerja keuangan yang kurang baik, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah lebih banyak melakukan kegiatan penghentian atau penjualan aset tetap daripada melakukan penambahan aset tetap.
- b. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan saldo negatif, yang menandakan kinerja keuangan yang positif pada pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menginvestasikan lebih banyak dalam aset tetap daripada jumlah kas yang diperoleh dari penjualan aset tetap.

3. Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Pendanaan

$$\text{Tahun } n = \frac{\text{AKP}_n - \text{AKP}_{n-1}}{\text{AKP}_{n-1}} \times 100 \%$$

- a) Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yang menunjukkan saldo positif menggambarkan kinerja keuangan yang baik, bahkan dalam situasi defisit anggaran. Sebaliknya, arus kas bersih yang positif dari aktivitas pendanaan menandakan kinerja keuangan yang kurang optimal saat pemerintah memiliki surplus anggaran, mendorong ketergantungan pada sumber pembiayaan internal dan eksternal.
- b) Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yang menunjukkan saldo negatif mengindikasikan kinerja keuangan yang baik ketika pemerintah memiliki surplus anggaran. Di sisi lain, arus kas bersih yang negatif dari aktivitas pendanaan mencerminkan kinerja keuangan yang kurang optimal, terutama dalam situasi defisit anggaran.

4. Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Transitoris

$$\text{Tahun } n = \frac{\text{AKT}_n - \text{AKT}_{n-1}}{\text{AKT}_{n-1}} \times 100 \%$$

- a. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris menunjukkan saldo positif, menggambarkan situasi dimana penerimaan PFK lebih besar daripada pengeluaran PFK. Ini menyebabkan peningkatan dalam titipan atau hutang PFK pemerintah daerah semakin meningkat. Hal ini mencerminkan penurunan kinerja keuangan pemerintah.
- b. Arus kas bersih dari aktivitas transitori menunjukkan saldo negatif, mengindikasikan situasi di mana penerimaan PFK lebih kecil daripada pengeluaran PFK. Akibatnya, titipan atau hutang PFK pemerintah daerah menurun, yang mencerminkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah.

PEMBAHASAN

Analisis Arus Kas Aktivitas Operasi

Tabel 1. Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Operasi Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Arus Kas Bersih	Pertumbuhan	Persentase
2020	-Rp 570.046.389	Rp 105.003.740	-16%
2021	Rp 15.963.319	Rp 586.009.708	-103%
2022	Rp 11.583.048	-Rp 4.380.271	-27%
Rata-Rata Pertumbuhan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi			-49%

Sumber : data Laporan Arus Kas UPTD Puskesmas Seroja diolah (2023)

Hasil perhitungan dari Tabel 1 menunjukkan bahwa arus kas bersih aktivitas operasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terjadi penurunan arus kas sebesar Rp. 105.003.740 yang setara dengan penurunan sebesar -16%. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp.586.009.708 dengan penurunan presentase -103%. Begitu pun dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -Rp.4.380.271 dengan presentase -27%. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar -49%, dimana hal ini memiliki implikasi yang kurang baik karena diharapkan bahwa arus kas operasional UPTD Puskesmas Seroja menunjukkan saldo yang positif dimana mencerminkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya potensi ketidakefektifan dalam kinerja keuangan UPTD Puskesmas Seroja. Selain itu, dapat dilihat bahwa UPTD Puskesmas Seroja belum mencapai tingkat mandiri dalam pengelolaan dan pertumbuhan secara berkelanjutan yang tercermin dari adanya arus kas operasional yang mengalami penurunan. Oleh karena itu, keberlanjutan operasional UPTD Puskesmas Seroja memerlukan dukungan dana eksternal untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Analisis Arus Kas Aktivitas Investasi

Tabel 2. Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Investasi Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Arus Kas Bersih	Pertumbuhan	Persentase
2020	-Rp 8.400.000	Rp 32.889.907	-80%
2021	-Rp 49.259.400	-Rp 40.859.400	486%
2022	-Rp 62.117.050	-Rp 12.857.650	26%
Rata-Rata Pertumbuhan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			144%

Sumber : data Laporan Arus Kas UPTD Puskesmas Seroja diolah (2023)

Tabel 2 menunjukkan hasil dari perhitungan arus kas bersih aktivitas investasi terjadi penurunan dari tahun ke tahun . Pada tahun 2020, terjadi Pertumbuhan arus kas sebesar -Rp.32.889.907 yang setara dengan presentase penurunan sebesar -80%. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar -Rp.40.859.400 dengan kenaikan presentase 486%. Begitu pun dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -Rp.12.857.650 dengan presentase 26%. Selama tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 144%, hal ini merupakan pencapaian yang baik mengindikasikan bahwa selama tiga tahun terakhir UPTD Puskesmas Seroja telah aktif dalam memperoleh peralatan dan mesin sebagai aset tetap. Hal ini terlihat dari pengeluaran kas yang lebih besar untuk investasi aset tetap daripada penerimaan kas penjualan aset tetap.

Analisis Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Tabel 3. Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Pendanaan Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Arus Kas Bersih	Pertumbuhan	Persentase
2020	-Rp 1.708.697.908	Rp 272.304.071	-14%
2021	Rp -	Rp -	0%
2022	Rp -	Rp -	0%
Rata-Rata Pertumbuhan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			-5%

Sumber : data Laporan Arus Kas UPTD Puskesmas Seroja diolah (2023)

Tabel 3 memperlihatkan hasil perhitungan arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan pada tahun 2020 menunjukkan saldo negatif, sementara pada tahun 2021-2022 tidak ada saldo kas yang tercatat. Jika dianalisis dari segi pertumbuhan arus kas pendanaan UPTD Puskesmas Seroja, terjadi penurunan pertumbuhan sebesar Rp. 272.304.071 dengan presentase -14% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, tidak ada pertumbuhan karena tidak ada arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan. Selama tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan per tahunnya adalah -5%, menunjukkan bahwa selama periode 2020-2022, UPTD Puskesmas Seroja memiliki surplus dana yang dapat dialokasikan untuk memperkuat dana cadangan, melakukan investasi dalam bentuk aset keuangan daerah seperti surat berharga, dan tidak ada pengeluaran terkait dengan penyertaan modal, pelunasan pinjaman daerah, atau pemberian pinjaman daerah.

Analisis Arus Kas Aktiviats Transitoris

Tabel 1. Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Transitoris Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Arus Kas Bersih	Pertumbuhan	Persentase
2020	Rp -	Rp -	0%
2021	Rp -	Rp -	0%
2022	Rp -	Rp -	0%
Rata-Rata Pertumbuhan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris			0%

Sumber : data Laporan Arus Kas UPTD Puskesmas Seroja diolah (2023)

Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan dari arus kas bersih aktivitas transitoris pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2020, tidak ada perubahan arus kas karena tidak ada transaksi arus kas masuk atau kas keluar dalam aktivitas transitoris. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 aktivitas transitoris menunjukkan stabilitas dikarenakan keseimbangan antara jumlah arus kas masuk dan kas keluar yang tidak mengakibatkan dampak signifikan pada perubahan arus kas secara keseluruhan. Oleh karena itu UPTD Puskesmas Seroja dapat mengelola arus kas dengan baik selama tiga tahun terakhir yaitu periode tahun 2020-2022 memastikan bahwa tidak ada ketidakseimbangan arus kas yang signifikan dalam aktivitas transitoris.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pertumbuhan arus kas yang telah dilakukan terhadap laporan arus kas UPTD Puskesmas Seroja selama periode anggaran 2020-2022 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis arus kas bersih dari kegiatan operasional menunjukkan saldo negatif, dengan pertumbuhan arus kas operasional mengalami penurunan selama periode anggaran tahun 2020-2022. Tercatat penurunan pertumbuhan sebesar -16% pada tahun 2020, -103 % pada tahun 2021, dan -27% pada tahun 2022. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan arus kas operasional selama tahun 2020-2022 mengalami penurunan signifikan sebesar -49%. Hal ini mengindikasikan ketidakefektifan kinerja keuangan UPTD Puskesmas Seroja selama tahun 2020-2022. Oleh karena itu, agar kelangsungan operasional UPTD Puskesmas Seroja dapat berjalan dengan baik dibutuhkan dukungan dana eksternal agar kegiatan operasional bidang pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
2. Analisis arus kas bersih dari aktivitas investasi menunjukkan saldo negatif. Melihat perkembangan arus kas aktivitas investasi dalam rentang tahun 2020-2022 terlihat bahwa UPTD Puskesmas Seroja mengalami fluktuasi dalam pertumbuhan arus kasnya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan sebesar -80%. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 486% dan ditahun 2022 mengalami penurunan sebesar 26 %. Secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata arus kas investasi selama tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebesar -49%. Hal ini mengindikasikan bahwa UPTD Puskesmas Seroja pada periode tahun 2020-2022 telah aktif dalam memperoleh aset tetap seperti peralatan dan mesin. Peningkatan pengeluaran kas untuk investasi dalam aset tetap daripada penerimaan kas dari penjualan aset tetap mencerminkan komitmen untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat.
3. Analisis arus kas bersih dari aktivitas pendanaan menunjukkan saldo negatif . Ditahun 2020 arus kas pendanaan menunjukkan saldo negatif yaitu sebesar -14 %, sementara pada tahun 2021-2022 tidak memiliki saldo kas dikarenakan tidak adanya transaksi masuk dan keluar dalam aktivitas pendanaan. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan arus kas pendanaan 2020-2022 mengalami penurunan sebesar -5%. Hal ini mengindikasikan bahwa UPTD Puskesmas Seroja menunjukkan kinerja keuangan yang baik, menghasilkan surplus dana untuk cadangan, investasi dalam aset keuangan daerah seperti surat berharga, pembayaran atau pemberian pinjaman daerah.
4. Analisis arus kas bersih dari aktivitas transitoris menunjukkan saldo nol. Pada tahun 2020, aktivitas transitoris tetap stabil karena tidak ada transaksi kas masuk atau keluar. Kemudian, pada tahun 2021 dan 2022 aktivitas transitoris tetap konsisten tanpa perubahan dalam arus kas. Hal ini disebabkan oleh keseimbangan antara jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar dimana menghasilkan kesamaan jumlahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa UPTD Puskesmas Seroja dapat mengelola arus kas dengan baik selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2020-2022, memastikan tidak adanya ketidakseimbangan arus kas yang berarti dalam aktivitas transitoris.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberi saran agar UPTD Puskesmas Seroja mengoptimalkan efisiensi serta efektivitas penggunaan saldo kasnya, dengan fokus pada penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan dan keberlanjutan operasional serta menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, menjadi penting bagi UPTD Puskesmas Seroja untuk terus mengupayakan peningkatan kinerja keuangan yang berfokus pada pencapaian tujuan pelayanan yang optimal.

REFERENSI

- Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(Vol 4, No 2 (2019)), 1113–1132. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/248>
- Hedi, O., Kudhori, A., Pandowo, H., & Madiun, N. (2016). (*Studi Empiris Di Pemerintah Kota Madiun*). 85–96.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). MENGELOLA KEUANGAN Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PUSKESMAS. *Serial Materi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah*, 53(9), 1689–1699. <http://researchinstitute.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2019/11/C.-Materi-Pelatihan-Seri-Layanan-Dasar-Mengelola-Keuangan-UPTD-Puskesmas.pdf>
- Nasution, dito aditia darma. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia NOMOR 71 TAHUN 2010. (2020). *Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*. 4–7.
- Santoso, D., Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2021). Analisis Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Ekonomi , Bisnis Dan Akuntansi*, 23(2), 103–113.